

KIBLAT NEGARA DEMOKRASI DARI BERBAGAI REPRESENTASI (KAJIAN PEMILU INDONESIA)

Mustafa Habib

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum

Email: mustafahabibhmi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai representasi dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mencerminkan arah kiblat negara demokrasi. Pemilu merupakan proses sentral dalam sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi politik warga negara dalam menentukan pemimpin dan kebijakan publik. Dalam kajian ini, dilakukan analisis terhadap berbagai representasi yang terkait dengan Pemilu di Indonesia. Representasi tersebut meliputi perwakilan politik dari berbagai partai politik, partisipasi masyarakat dalam pemilihan, media massa, dan peran institusi pemilihan. Pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu bentuk representasi politik yang penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa Pemilu di Indonesia mencerminkan arah kiblat negara demokrasi melalui berbagai aspek. Kesimpulannya, pemilihan umum di Indonesia melalui berbagai representasi politik mencerminkan arah kiblat negara demokrasi. Partai politik, partisipasi masyarakat, media massa, dan institusi pemilihan semuanya berperan dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di negara ini. Penting untuk terus meningkatkan dan memperkuat aspek-aspek ini guna membangun negara demokrasi yang lebih kuat dan inklusif di masa depan.

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilu, Identitas, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze various representations in general elections (Pemilu) in Indonesia and how this reflects the orientation of a democratic country. Elections are a central process in a democratic system that allows citizens' political participation in determining leaders and public policies. In this study, an analysis of various representations related to elections in Indonesia is carried out. The representation includes political representatives from various political parties, public participation in elections, the mass media, and the role of electoral institutions. General elections in Indonesia are an important form of political representation in realizing the principles of democracy. Through this analysis, it is found that elections in Indonesia reflect the orientation of a democratic country through various aspects. In conclusion, general elections in Indonesia through various political representations reflect the direction of the Qibla of a democratic

country. Political parties, public participation, mass media, and electoral institutions all play a role in maintaining the integrity and quality of democracy in this country. It is important to continuously improve and strengthen these aspects in order to build a stronger and inclusive democracy in the future.

Keywords: *Democracy, Elections, Identity, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia memiliki peranan penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai kiblat negara demokrasi yang diakui oleh berbagai representasi. Sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah berhasil mempertahankan dan mengembangkan demokrasinya selama lebih dari sepuluh tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal menghargai keberagaman masyarakat, dinamika politik, dan isu-isu keberagaman yang ada.

Pemilu menjadi acuan utama dalam menilai kondisi demokrasi suatu negara. Dalam konteks negara Indonesia, setelah UUD 1945, semua wakil, presiden, dan kepala daerah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum (Kosasih, 2018). Dari perspektif rakyat, pemilihan umum merupakan instrumen yang mewujudkan kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan sarana untuk mengartikulasikan keinginan dan kepentingan rakyat (Ghins, 2021). Asas pemilihan umum dalam undang-undang pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Rais et al., 2021). Dalam konteks pelaksanaan di Indonesia, pemilihan umum sendiri pertama kali diadakan pada tahun 1955 (Pamungkas & Arifin, 2019). Maka, dalam penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara demokrasi dengan dilihat dari unsur pendekatan normatif dan pendekatan empiris terhadap demokrasi yang seharusnya dilakukan oleh pemilih dan pada pelaksana pemilihan umum (pemilu) seperti yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 tentang pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan secara demokrasi.

Dalam konteks pemilihan umum, Indonesia menjadi sorotan dan menjadi panutan bagi negara-negara lain yang ingin membangun dan menjalankan sistem demokrasi yang kuat. Pemilihan umum merupakan momen penting di mana rakyat Indonesia secara langsung berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Proses pemilu ini mencerminkan semangat demokrasi yang ada di Indonesia dan menjadi cerminan dari kekuatan demokrasi yang dijaga dengan baik.

Melalui kajian pemilihan umum di Indonesia, akan tergambar situasi politik yang terjadi pada pemilihan presiden tahun 2014. Selain itu, kajian ini juga akan membahas respon dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu yang dilakukan beberapa bulan terakhir, Indonesia

terus menunjukkan keberhasilannya sebagai contoh sukses dalam menjalankan demokrasi dengan berbagai identitas yang beragam, seperti negara multikultural, negara berkembang, dan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia.

Dalam menganalisis pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia, penting untuk melihatnya dari perspektif identitas. Konsep identitas menjadi faktor kunci dalam memahami dinamika politik dan pemilihan umum di negara ini. Identitas Indonesia sebagai negara demokrasi menjadi menarik ketika dibandingkan dengan identitas negara lain, seperti identitas dan peran sebagai negara berkembang serta identitas kolektif sebagai negara di kawasan Asia Tenggara.

Terdapat pandangan dari berbagai koran yang menyatakan bahwa proses pemilihan umum di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga mendapatkan dukungan dan pengaruh dari pihak asing. Kematangan demokrasi Indonesia saat ini tidak lepas dari upaya dan dukungan internasional, serta peran yang diemban oleh Indonesia dalam mempertahankan identitasnya sebagai negara demokrasi di kancah internasional.

Dengan mengkaji pemilihan umum di Indonesia, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai peran Indonesia sebagai kiblat negara demokrasi yang beragam. Penting untuk menganalisis pemilihan umum dan demokrasi dengan mempertimbangkan konsep identitas sebagai landasan dalam memahami dan menghargai keberagaman dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, pemahaman tentang peran Indonesia sebagai kiblat negara demokrasi yang beragam menjadi sangat relevan. Pemilu di Indonesia tidak hanya melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara, tetapi juga mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan demokrasi dengan identitas yang beragam.

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman masyarakat, budaya, dan agama yang kaya. Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah berhasil mengembangkan demokrasinya dengan menghargai dan memperhatikan keberagaman tersebut. Proses pemilihan umum menjadi arena di mana perbedaan-perbedaan tersebut diakui dan dihargai, sehingga mencerminkan kekuatan demokrasi Indonesia yang inklusif.

Pemilihan presiden tahun 2014 menjadi salah satu contoh penting yang dapat dianalisis dalam kajian ini. Pada saat itu, situasi politik di Indonesia sangat menarik perhatian baik dari dalam maupun luar negeri. Respons dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokrasi di Indonesia juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Dalam pemilu beberapa bulan terakhir, Indonesia terus menunjukkan keberhasilannya dalam menjalankan sistem demokrasi dengan berbagai identitas yang beragam, seperti negara multikultural, negara

berkembang, dan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia.

Analisis pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia juga perlu mempertimbangkan konsep identitas. Identitas Indonesia sebagai negara demokrasi tidak hanya dievaluasi dan dibandingkan dengan negara-negara lain, tetapi juga dalam konteks identitas dan peran Indonesia sebagai negara berkembang dan identitas kolektif sebagai negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks internasional, Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan identitasnya sebagai negara demokrasi, dengan dukungan dan upaya internasional yang tidak dapat diabaikan.

Melalui kajian pemilihan umum di Indonesia, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Indonesia sebagai kiblat negara demokrasi yang beragam. Pemilihan umum dan demokrasi harus dianalisis dengan mempertimbangkan konsep identitas, sehingga dapat memahami dinamika politik dan menghargai keberagaman dalam sistem demokrasi. Pemilu di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik dan internasional, yang berperan dalam membentuk kematangan demokrasi saat ini.

Dengan melanjutkan kajian ini, diharapkan kita dapat mengapresiasi peran Indonesia sebagai kiblat negara demokrasi yang berhasil menjaga dan mengembangkan sistem demokrasi dengan berbagai identitas yang beragam. Penting untuk terus menganalisis pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia sebagai cermin keberhasilan dan tantangan dalam menjalankan sistem demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Proses pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis, menetapkan hak dan kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu yang adil serta bertanggung jawab (Cerdas & Afandi, 2019; Sobari, 2019).

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode Komparatif Studi yakni Metode yang melibatkan perbandingan pemilihan umum di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki karakteristik serupa, baik dalam hal keberagaman, status sebagai negara berkembang, maupun identitas kolektifnya. Teknik analisis data menggunakan Analisis Kasus: Teknik ini melibatkan studi mendalam terhadap kasus-kasus pemilihan umum yang relevan di Indonesia dan negara-negara lain.

PEMBAHASAN

1. Konsepsi Negara Demokrasi Dan Pemilu

Konsepsi negara demokrasi mengacu pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Di negara demokrasi, keputusan politik

dibuat melalui proses partisipatif dan pengambilan keputusan dilakukan secara adil, terbuka, dan berdasarkan pemilihan umum. Prinsip utama dari negara demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana keputusan politik didasarkan pada suara mayoritas.

Pemilihan umum merupakan mekanisme sentral dalam negara demokrasi. Pemilihan umum memungkinkan warga negara untuk memilih para pemimpin politik, seperti presiden, anggota parlemen, dan pemerintah lokal. Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan memilih perwakilan mereka. Pemilihan umum diatur oleh peraturan hukum dan melibatkan berbagai tahap, seperti pendaftaran pemilih, kampanye politik, pencoblosan suara, dan penghitungan suara. Proses pemilihan umum harus dilakukan secara adil, transparan, dan terbuka, sehingga warga negara dapat mengeluarkan suara mereka tanpa paksaan atau intimidasi.

Pemilihan umum juga merupakan sarana untuk mengekspresikan keberagaman pendapat dan preferensi politik di dalam masyarakat. Melalui pemilihan umum, pemilih dapat memilih calon atau partai politik yang mereka anggap mewakili kepentingan dan pandangan mereka. Pemilihan umum juga berperan dalam memperkuat legitimasi pemerintahan dan mempertahankan stabilitas politik. Dengan memberikan warga negara hak untuk memilih, pemilihan umum memungkinkan pemerintah yang terpilih untuk memperoleh legitimasi yang kuat dan dukungan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Secara keseluruhan, konsepsi negara demokrasi dan pemilihan umum saling terkait erat. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam praktik politik, sementara negara demokrasi memberikan kerangka hukum dan institusional yang memfasilitasi pemilihan umum yang adil dan transparan.

2. Mengenal Identitas Sebuah Negara

Dalam konsep pemilihan umum (pemilu) demokrasi, mengenal identitas sebuah negara memiliki peran penting. Identitas sebuah negara mencakup berbagai aspek, seperti budaya, sejarah, nilai-nilai, kepercayaan, dan karakteristik masyarakatnya. Identitas ini menjadi dasar bagi negara untuk membentuk sistem politik dan melaksanakan pemilihan umum.

Pertama, identitas sebuah negara membantu dalam membentuk kesadaran politik dan partisipasi aktif warga negara dalam pemilu. Identitas yang kuat dan jelas dapat membangkitkan rasa keterikatan dan kebanggaan warga negara terhadap negara mereka. Hal ini dapat mendorong partisipasi warga negara dalam pemilihan umum, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk membentuk masa depan negara mereka melalui pemilihan politik.

Kedua, identitas negara mempengaruhi kebijakan dan platform politik yang diusung oleh partai dan kandidat dalam pemilihan umum. Nilai-nilai dan prinsip yang menjadi bagian dari identitas negara akan tercermin dalam janji-janji dan program-program politik yang ditawarkan. Identitas yang berakar kuat dalam demokrasi dapat mendorong partai politik untuk menganut prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebebasan berpendapat.

Ketiga, identitas negara juga dapat mempengaruhi dinamika pemilihan umum dalam hal kompetisi politik. Identitas yang multikultural atau multireligius dapat mendorong adanya representasi yang inklusif dan partisipasi politik yang seimbang dari berbagai kelompok masyarakat. Pemilihan umum yang mencerminkan keberagaman identitas negara akan menghasilkan representasi yang lebih akurat dan menghargai kepentingan semua warga negara.

Keempat, identitas negara juga dapat memengaruhi persepsi internasional terhadap proses pemilihan umum dan stabilitas politik negara. Jika sebuah negara memiliki identitas yang kuat sebagai negara demokratis, proses pemilihan umum yang adil dan transparan akan lebih dipercaya oleh komunitas internasional. Identitas negara yang demokratis juga dapat memperkuat citra positif negara tersebut di mata negara-negara lain, serta memperoleh dukungan dan kerja sama internasional.

Dalam konsep pemilihan umum demokrasi, mengenal identitas sebuah negara menjadi penting karena identitas ini membentuk landasan nilai dan prinsip yang mendasari sistem politik, partisipasi publik, dinamika kompetisi politik, serta persepsi internasional terhadap negara tersebut. Dengan memahami identitas negara, pemilihan umum dapat dijalankan dengan lebih efektif dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan memperkuat keberlanjutan demokrasi di suatu negara

3. Model, Proses dan Hasil Pemilu Presiden Indonesia

Proses pemilihan umum (pemilu) presiden di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang penting. Berikut adalah tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan dalam pemilu presiden Indonesia:

- a. Pendaftaran Calon Presiden: Tahapan ini melibatkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon presiden harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti memiliki kewarganegaraan Indonesia, memiliki dukungan partai politik atau jumlah dukungan yang telah ditentukan, dan tidak memiliki hambatan hukum yang menghalangi pencalonan.
- b. Kampanye Pemilu: Setelah pendaftaran, calon presiden dan wakil presiden memulai kampanye untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Kampanye dilakukan melalui berbagai media, seperti pidato publik, pertemuan massa, debat kandidat, dan iklan politik.
- c. Pemungutan Suara: Pada hari pemungutan suara, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka secara

rahasia. Suara warga negara ini akan menjadi penentu dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih.

- d. Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan penghitungan suara di masing-masing tempat pemungutan suara. Penghitungan suara ini dilakukan secara transparan dan terbuka untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam proses pemilu.
- e. Penetapan Pemenang: Setelah penghitungan suara selesai, KPU (Komisi Pemilihan Umum) akan melakukan proses penetapan pemenang berdasarkan hasil pemungutan suara. Calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai pemenang pemilu presiden.

Hasil pemilu presiden Indonesia akan menentukan siapa yang akan memimpin negara selama periode tertentu. Calon presiden yang terpilih akan dilantik dan memulai tugasnya dalam menjalankan pemerintahan serta mewujudkan janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Pemilu presiden di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga demokrasi dan menentukan arah politik negara. Dengan melalui proses yang transparan, adil, dan partisipatif, pemilu presiden diharapkan dapat mewakili kehendak rakyat serta memperkuat kestabilan politik dan pembangunan negara.

4. Kisah Indonesia sebagai Kiblat Demokrasi

Indonesia telah menjadi kiblat demokrasi yang menarik perhatian dunia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan keberagaman budaya yang kaya, Indonesia telah mengalami perjalanan yang menarik dalam membangun dan mempertahankan sistem demokrasi. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah melalui beberapa fase politik yang berbeda, termasuk era otoriter dan transisi menuju demokrasi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang menghasilkan perubahan sistem politik menjadi lebih terbuka dan demokratis.

Pada tahun 1999, Indonesia mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih anggota parlemen. Ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kemudian, pada tahun 2004, Indonesia mengadakan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Pemilihan presiden secara langsung ini menjadi landasan yang kuat untuk memperkuat partisipasi politik rakyat dalam menentukan pemimpin negara. Sejak itu, Indonesia telah mengadakan pemilihan umum secara teratur setiap lima tahun untuk memilih presiden dan anggota parlemen. Pemilu di Indonesia menjadi ajang demokrasi yang meriah dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.

Kisah Indonesia sebagai kiblat demokrasi juga tercermin dalam keberagaman identitas negara ini. Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Meskipun tantangan keberagaman ini ada, Indonesia telah berhasil mengelola dan memperkuat identitas nasionalnya sebagai negara yang inklusif dan demokratis. Keberhasilan Indonesia sebagai kiblat demokrasi dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu, kebebasan berpendapat dan berkumpul, keberagaman politik yang terwakili dalam partai politik yang beragam, serta peningkatan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam perjalanan demokrasinya. Misalnya, masih ada isu-isu terkait korupsi, ketimpangan sosial, dan perlindungan hak minoritas. Namun, melalui komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia terus berjuang untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat fondasi demokrasi negara. Kisah Indonesia sebagai kiblat demokrasi menginspirasi negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara dan dunia Muslim, untuk mengembangkan dan memperkuat sistem demokrasi mereka sendiri. Melalui pengalaman dan perjalanan demokrasi yang unik, Indonesia membuktikan bahwa keberagaman dan demokrasi dapat hidup berdampingan dan saling mendukung.

Sebagai negara demokrasi yang maju, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat demokrasi dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi di tingkat global. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan negara-negara lain, partisipasi dalam forum-forum internasional, dan peningkatan kapasitas dalam bidang demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penting bagi Indonesia untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses pemilu serta memastikan transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pemilihan. Reformasi pemilihan yang terus dilakukan akan memperkuat sistem demokrasi Indonesia dan menjaga legitimasi pemerintah yang berasal dari kehendak rakyat.

Selain itu, Indonesia juga dapat berperan sebagai contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola keberagaman dan membangun masyarakat yang inklusif. Dengan menghargai perbedaan budaya, agama, dan suku, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses politik. Namun, perjalanan menuju demokrasi yang lebih baik tidak berhenti di situ. Indonesia perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem politik dan pemilu, mengatasi hambatan-hambatan yang masih ada, serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Kisah Indonesia sebagai kiblat demokrasi tidak hanya mencerminkan prestasi yang telah dicapai, tetapi juga merupakan tantangan yang harus terus dihadapi dan diperjuangkan. Dengan tekad yang kuat, Indonesia dapat terus menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam membangun dan memperkuat sistem demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian mengenai Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi dalam konteks Pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Indonesia telah berhasil mempertahankan dirinya sebagai kiblat negara demokrasi yang menarik perhatian berbagai representasi. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan transformasi yang signifikan dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir.
2. Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan jati dirinya sebagai negara demokrasi yang kuat sangat menarik perhatian dan menjadi teladan bagi negara-negara lain. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia telah berhasil menghargai keberagaman masyarakat, dinamika politik, dan isu-isu keberagaman yang ada.

3. Pemilihan umum di Indonesia, khususnya Pemilu Presiden pada tahun 2014, merupakan momen penting dalam menjaga dan memperkuat mekanisme demokrasi. Respons dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokrasi di Indonesia juga perlu diperhatikan.
4. Indonesia terus menjadi contoh sukses dalam berbagai jenis demokrasi yang berbeda, termasuk sebagai negara multikultural, negara yang sedang berkembang, dan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia.
5. Dalam menganalisis permasalahan terkait pemilihan umum dan demokrasi, penting untuk melihatnya dari perspektif identitas. Identitas Indonesia sebagai negara demokrasi dievaluasi dan dibandingkan dengan identitas negara-negara lain, serta dengan identitas dan peran Indonesia sebagai negara berkembang dan negara di kawasan Asia Tenggara.
6. Pentingnya dukungan dan upaya internasional dalam meningkatkan kematangan demokrasi di Indonesia. Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam mempertahankan identitasnya sebagai negara demokrasi di arena internasional.

Dengan demikian, Indonesia sebagai kiblat negara demokrasi memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan demokrasi yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menjadi teladan bagi negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi*, 25(1), 72–83. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>
- Ghins, A. (2021). “Popular Sovereignty that I Deny”: Benjamin Constant on Public Opinion, Political Legitimacy and Constitution Making. *Modern Intellectual History*, 1–31.
- Kosasih, A. (2018). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1).
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 16–30. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>
- Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Journal Homepage: Http://Jurnal. Unmer. Ac. Id/Index. Php/Blj*, 2(2). <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6825>
- Sobari, W. (2019). Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 di Kabupaten Malang. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2), 90–106.